



PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA DAN KOMITMEN INDONESIA

YULIA INDAHRI^{*)}

Abstrak

Di tengah Peringatan Hari AIDS Sedunia di Indonesia yang menelan dana miliaran rupiah, ternyata masih ditemukan banyak kasus diskriminasi terhadap Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Pada akhir November, Wakil Presiden yang menghadiri hari peringatan Hari AIDS Sedunia menyampaikan pidato yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap permasalahan HIV/AIDS. Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa stigma dan diskriminasi terkait HIV di tempat kerja sudah berkurang dan akan terus diperbaiki. Tetapi beberapa hari kemudian terungkap, seorang anak hampir ditolak masuk sekolah karena ayahnya terinfeksi HIV. Sepertinya pelaksanaan program diseminasi informasi mengenai HIV/AIDS tidak sampai ke masyarakat secara utuh, dan karenanya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memahami salah satu penyakit yang pada tahun 2010 telah secara global menelan korban 1,8 juta jiwa meninggal dunia.

Pendahuluan

Dunia memperingati Hari AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) setiap tanggal 1 Desember. Peringatan pertama pada tahun 1988 berawal dari pemikiran dua pejabat *Global Programme on AIDS* di WHO yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kedua pejabat, James W. Bunn dan Thomas Netter mencetuskan ide awal pada Agustus 1987 dan kemudian menyampaikan ide mereka kepada Dr. Jonathan Mann, Direktur Program AIDS Global pada waktu itu. Kemudian direkomendasikan peringatan pertama Hari AIDS Sedunia untuk diselenggarakan pada 1 Desember 1988 bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia.

Peringatan Hari AIDS Sedunia tahun ini juga dirayakan di Indonesia dan dipusatkan di Silang Monas. Puncak acara peringatan pada tanggal 27 November tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden dan sekitar 6.700 pelajar, buruh, pelaku usaha, kalangan pemerintah dan juga kalangan LSM. Tema yang diangkat oleh Indonesia untuk peringatan tahun ini adalah melindungi pekerja dan dunia usaha dari HIV dan AIDS. “Aku Bangga Aku Tahu” menjadi *tagline* penancangan kampanye HIV/AIDS sebagai upaya penyadaran bersama, bahwa upaya pencegahan HIV/AIDS harus lebih diperluas dan ditingkatkan kualitasnya.

Kampanye ini tidak terlalu jauh berbeda dengan visi ketika pertama kali tanggal 1 Desember ditetapkan

^{*)} Peneliti Muda bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: y.indahri@gmail.com

sebagai Hari AIDS Sedunia yaitu untuk menumbuhkan kesadaran mengenai AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Pada tahun 2004, dibentuk Program Bersama PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS) dan sejak tahun tersebut dilakukan kampanye Hari AIDS Sedunia. Untuk tahun ini, PBB mengusung kampanye nol angka infeksi baru HIV, nol angka diskriminasi, dan nol angka kematian terkait AIDS.

AIDS di Indonesia

Dalam situs *A Brief History of HIV/AIDS* disampaikan bahwa kasus AIDS pertama kali ditemukan lebih dari setengah abad yang lalu yaitu pada tahun 1959. Sedangkan untuk Indonesia, dalam penelitian yang dilakukan di tahun 1983 oleh Dr. Zubairi Djoerban terhadap waria di Jakarta, dinyatakan bahwa kemungkinan dua di antara 30 obyek penelitian telah terkena AIDS. Sedangkan kasus AIDS pertama yang dilaporkan adalah kasus di Bali pada tahun 1987.

Berdasarkan laporan situasi perkembangan HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan triwulan II Tahun 2011 yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada Juli 2011, saat ini angka kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan adalah 26.483 kasus. Angka tersebut diperoleh dari 33 Provinsi dan 300 Kabupaten/Kota yang melapor.

Jika melihat dari data per Provinsi, maka terlihat bahwa Indonesia telah memasuki epidemi terkonsentrasi. Surveilans Terpadu HIV dan Perilaku di tahun 2007 menunjukkan prevalensi HIV pada populasi kunci: Wanita Pekerja Seks (WPS) langsung 10,4%; WPS tidak langsung 4,6%; waria 24,4%; pelanggan WPS 0,8%; lelaki seks dengan lelaki (LSL) 5,2%; dan pengguna napza suntik 52,4%. Di provinsi Papua dan Papua Barat terdapat pergerakan ke arah *generalized epidemic* dengan prevalensi HIV sebesar 2,4% pada penduduk produktif 15–49 tahun. Kecenderungan epidemi HIV ke depan menggambarkan perubahan

penularan HIV, dimana selain populasi kunci yang sudah ditangani selama ini, penting pula memperhatikan peningkatan infeksi HIV pada LSL.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 tahun 2006 mengatur mengenai pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Komisi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dirasakan perlu didirikan agar komunikasi, koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan lebih terarah. Perpres ini juga menandai terjadinya intensifikasi penanggulangan AIDS. Keanggotaan KPA Nasional kemudian diperluas dengan mengikutsertakan masyarakat sipil dan Ketua Komisi bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Perkembangan kebijakan-kebijakan yang terjadi mendorong berkembangnya berbagai layanan pencegahan, serta perawatan, dukungan dan pengobatan. Cakupan program meningkat, namun ternyata masih ada kesenjangan yang besar untuk mencapai target *universal access*. Dengan adanya dukungan dana tambahan baik di tingkat pusat maupun daerah dan bantuan mitra internasional seperti *Global Fund Ronde 8*, tampaknya *universal access* diharapkan akan dapat dicapai.

Berdasarkan laporan pada Sessi Khusus PBB mengenai HIV/AIDS (*United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS – UNGGASS*) Pemerintah telah secara signifikan meningkatkan alokasi sumber daya dalam negeri untuk AIDS dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2006 sampai 2009, anggaran yang dialokasikan untuk AIDS meningkat 7 kali, dari US \$ 11 juta menjadi US \$ 73 juta. Selama periode yang sama, anggaran provinsi dan kabupaten meningkat sekitar 3,5 kali dari Rp20 miliar menjadi Rp74 miliar.

Epidemi HIV di Indonesia adalah salah satu yang tercepat di Asia. Pada akhir

2009, diperkirakan bahwa ada 333.200 orang yang hidup dengan HIV (ODHA) di Indonesia. Jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan telah meningkat tajam dari 2.682 kasus pada tahun 2004 menjadi 19.973 pada Desember 2009. Di antara kasus 25% adalah perempuan. Epidemio AIDS sekarang mempengaruhi hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti dapat dilihat pada laporan Depkes terbaru. Pada tahun 2004 hanya 16 dari 33 provinsi yang melaporkan HIV. Namun, pada akhir 2009, kasus AIDS yang dilaporkan terjadi di 32 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Peningkatan ini mencerminkan adanya penyebaran infeksi dan pelaporan sudah lebih baik dengan adanya dukungan konseling dan tempat pengujian di berbagai provinsi.

Di provinsi Papua dan Papua Barat (di ujung timur Indonesia, berbatasan dengan Papua Nugini) situasi HIV saat ini sangat serius karena telah menyebar ke populasi umum. Hal ini didorong hampir secara eksklusif oleh hubungan seksual tidak aman. *Generalized epidemic* dengan prevalensi HIV sebesar 2,4% ditemukan pada populasi produktif.

Pada tahun 2008 dan 2009, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menganjurkan untuk meningkatkan sumber daya dari Pemerintah untuk memberikan dukungan kepada orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dan organisasi berbasis masyarakat untuk membantu ODHA dalam mengakses perawatan, dukungan, dan pengobatan berkualitas.

Program-program pengurangan dampak buruk yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia pada skala kecil sudah dimulai sejak tahun 2003. Pada akhir 2008 ada sekitar 49.000 *injection drug users* (IDU) yang telah memanfaatkan layanan program jarum suntik melalui 281 situs yang tersedia. Pada akhir 2009, IDU yang membutuhkan terapi pemeliharaan metadon (*methadone maintenance treatment* - MMT) dapat menerima layanan di 46 unit MMT yang tersedia di beberapa pusat kesehatan, rumah sakit dan penjara.

Tantangan

Berbagai kampanye dan upaya pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak sepertinya kurang didukung dengan tindakan tegas dari pemerintah kepada orang yang berkepentingan dengan penularan HIV/AIDS. Hal itu terbukti dengan menurunnya tingkat kesadaran penggunaan kondom pada seks berisiko di Indonesia. Thailand dan Kamboja dapat dijadikan contoh jika ada keinginan besar dari pemerintah untuk mengurangi HIV/AIDS. Mereka sudah menerapkan aturan pemberian sanksi terhadap mucikari yang menyediakan jasa pelacuran.

Sedangkan di Indonesia, upaya yang dilakukan hanya sebatas menutup sejumlah lokalisasi. Selain itu, informasi yang diberikan kepada masyarakat masih bersifat parsial, sehingga pemahaman pun justeru memunculkan pemberian stigma negatif pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Seharusnya, sosialisasi HIV dilakukan secara komprehensif dan sedini mungkin. Misalnya, dengan menyelipkan materi HIV/AIDS dalam kurikulum sekolah.

Kenyataan lain yang kontra produktif terhadap upaya penyampaian informasi yang berimbang mengenai HIV/AIDS adalah sistem layanan kesehatan pada ODHA yang juga diskriminatif. Sebagai gambaran, masih terbatas fasilitas kesehatan yang bersedia melayani ODHA. Petugas kesehatan yang paham soal penanganan HIV pun masih terbatas.

Beberapa contoh diskriminasi terhadap para ODHA dalam bentuk pengucilan dari masyarakat dialami juga oleh Zipporah Imogen Divine alias Immi. Putri Fajar Jasmin Sugandhi itu sempat dibatalkan penerimaannya sebagai siswa di SD Don Bosco 1 Kelapa Gading dikarenakan status dari ayahnya yang terinfeksi HIV. Setelah kasus mencuat di media massa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menggelar mediasi di Kemenko Kesra, yang mengundang Sekretaris KPA Nasional, Ketua KPA Provinsi DKI Jakarta, Pembina Yayasan

Panca Dharma (SD Don Bosco), serta orang tua Immi.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa masih ada ketidaktahuan masyarakat umum mengenai HIV/AIDS yang menyebabkan terampasnya hak seseorang sebagai warga negara.

Penutup

Pemerintah melalui Kantor Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPA Nasional telah membuat Dokumen Strategis dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan analisis situasi epidemi dan tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun ke depan dari tahun 2010 sampai 2014. Strategi tersebut dijabarkan menjadi sejumlah fokus area program utama, yang meliputi pencegahan, pengobatan, mitigasi dampak dan lingkungan yang kondusif.

Dokumen utama tersebut harus dijaga keselarasan pelaksanaannya dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, utamanya UU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU tentang Kesehatan, UU tentang Hak Azasi Manusia, UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU tentang RPJPN Tahun 2005 -2025, dan UU tentang Kesejahteraan Sosial.

DPR dapat menggunakan Dokumen tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penetapan anggaran, karena Dokumen juga digunakan di tingkat nasional untuk dijabarkan ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah, rencana strategi sektor, untuk menjadi acuan penyusunan anggaran biaya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Selain itu Dokumen ini juga akan digunakan untuk mobilisasi dana baik dalam negeri maupun internasional.

Melihat arti penting penyebaran informasi yang seimbang dan benar mengenai HIV/AIDS, maka menjadi tugas kita bersama untuk tidak melekatkan stigma sosial negatif bagi ODHA. Tindakan pengasingan, penolakan, diskriminasi dan penghindaran atas ODHA tidak perlu dilakukan. HIV/AIDS adalah musuh kita bersama sehingga perlu ada kemantapan tekad dan upaya dalam mendukung kampanye Indonesia kali ini untuk melindungi pekerja dan dunia usaha dari HIV dan AIDS.

Rujukan:

1. Sejarah HIV di Indonesia, diakses di <http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040>, pada 2 Desember 2011.
2. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2009, Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010–2014, Jakarta: KPA Nasional.
3. UNAIDS, 2011, World AIDS Day Report, How to Get to Zero: Faster, Smarter, Better, Jenewa: UNAIDS.
4. Kementerian Kesehatan, 2011, Laporan Perkembangan Situasi HIV & AIDS di Indonesia, Jakarta: Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan.
5. Sambutan Ketua DPR-RI pada Pameran dan Talkshow DPP Partai Demokrat, Jakarta, 1 Desember 2011.
6. Sambutan Wakil Presiden RI pada Peringatan Hari AIDS Sedunia 2011, Jakarta, 27 November 2011.
7. Kampanye AIDS tidak Disertai Sanksi Tegas, *Media Indonesia*, 4 Desember 2011, diakses di <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/12/12/281160/265/114/Kampanye-AIDS-tidak-Disertai-Sanksi-Tegas> pada 5 Desember 2011.
8. A Brief History of HIV/AIDS diakses di <http://www.aegis.com/topics/timeline/> pada 5 Desember 2011.